



DINAMIKA GOVERNANCE JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA

<http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg/index>

PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN JALAN TOL YOGYAKARTA-BAWEN

Sela Ajeng Trianggraini¹, Moh. Musleh², M. Husni Tamrin³, Agus Subianto⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Administrasi Publik, Universitas Hang Tuah, Surabaya

*Email Corresponding: musleh.mohammad@hangtuah.ac.id

ARTICLE INFORMATION ABSTRACT

Article history:

Received date: 18 Maret 2025

Revised date: 1 April 2025

Accepted date: 18 April 2025

The development of toll road infrastructure is one of the main solutions to overcome congestion problems and improve connectivity between regions in Indonesia. The Yogyakarta-Bawen Toll Road Project is part of the National Strategic Project that aims to accelerate mobility between Yogyakarta and Central Java. This study aims to analyze the application of good governance principles in the planning and construction of the Yogyakarta-Bawen Toll Road project, using the theory put forward by the United Nations Development Programme (UNDP) in 1997. The principles analyzed include transparency, accountability, participation, effectiveness, and sustainability. The method used in this study is a literature study by reviewing related documents and previous research results. The results of the study indicate that although the principles of good governance have been applied in several aspects, such as transparency of information and accountability through periodic reports, challenges still arise in terms of community participation and efficiency of project implementation. Several aspects such as land acquisition and independent supervision also require more attention to accelerate project completion and reduce potential conflicts. This study suggests that the principle of community participation be strengthened and the monitoring mechanism be further improved in order to achieve inclusive and sustainable development success.

Keywords: Good governance; Yogyakarta-Bawen Toll Road; transparency; accountability; participation; infrastructure development.

ABSTRAKSI

Pembangunan infrastruktur jalan tol menjadi salah satu solusi utama untuk mengatasi masalah kemacetan dan meningkatkan konektivitas antarwilayah di Indonesia. Proyek Jalan Tol Yogyakarta - Bawen merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional yang bertujuan untuk mempercepat mobilitas antara Yogyakarta dan Jawa Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip good governance dalam perencanaan dan pembangunan proyek Jalan Tol Yogyakarta - Bawen, dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1997. Prinsip-prinsip yang dianalisis meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan keberlanjutan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dengan mengkaji dokumen - dokumen terkait dan hasil-hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun prinsip good governance telah diterapkan dalam beberapa aspek, seperti transparansi informasi dan akuntabilitas melalui laporan berkala, tantangan masih muncul dalam hal partisipasi masyarakat dan efisiensi pelaksanaan proyek. Beberapa aspek seperti pembebasan lahan dan pengawasan independen juga memerlukan perhatian lebih untuk mempercepat penyelesaian proyek dan mengurangi potensi konflik. Penelitian ini menyarankan agar prinsip partisipasi masyarakat diperkuat dan mekanisme pengawasan lebih ditingkatkan guna mencapai keberhasilan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Good governance; Jalan Tol Yogyakarta-Bawen; transparansi; akuntabilitas; partisipasi; pembangunan infrastruktur.

PENDAHULUAN

Daerah Yogyakarta dan Bawen, yang terletak di Pulau Jawa, memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara kawasan ekonomi di Yogyakarta dengan pusat-pusat ekonomi di Jawa Tengah. Yogyakarta dikenal sebagai destinasi wisata budaya dan pendidikan yang setiap tahunnya menarik jutaan wisatawan domestik maupun internasional. Sementara itu, Bawen merupakan simpul transportasi penting yang menghubungkan jalur menuju Semarang, Solo, dan Surakarta. Tingginya aktivitas transportasi di kedua daerah ini sering kali menyebabkan kemacetan yang berdampak pada waktu tempuh, biaya logistik, dan efisiensi transportasi. Menurut data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), pertumbuhan volume kendaraan di jalur penghubung antara Yogyakarta dan Bawen terus meningkat sebesar 6-8% setiap tahunnya, sehingga memerlukan solusi infrastruktur yang mampu mengakomodasi kebutuhan transportasi yang semakin kompleks (Rachmayani, 2022).

Pembangunan infrastruktur memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan mobilitas masyarakat, dan memperkuat konektivitas antar wilayah. Di Indonesia, pengembangan jaringan jalan tol menjadi salah satu prioritas utama pemerintah sebagai bagian dari upaya meningkatkan daya saing nasional. Jalan tol adalah infrastruktur strategis yang dirancang untuk meningkatkan konektivitas wilayah dan mengurangi kemacetan. Dalam rangka meningkatkan konektivitas wilayah tersebut, Kementerian PUPR terus melanjutkan pembangunan jalan tol yang hingga saat ini terdapat 68 ruas jalan tol dengan panjang 2.545 km yang telah beroperasi serta 27 ruas (1.809 km) yang masih dalam proses Pembangunan (Rachmayani, 2022). Kajian dari (Karjono et al., 2022) menunjukkan bahwa keberhasilan proyek jalan tol sangat bergantung pada perencanaan yang matang, pembebasan lahan yang efektif, serta pengelolaan risiko yang baik.

Salah satu proyek strategis nasional yang tengah menjadi perhatian adalah pembangunan Jalan Tol Yogyakarta - Bawen. Jalan tol ini diharapkan tidak

hanya mampu mengurangi kemacetan di wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah, tetapi juga mempercepat distribusi barang dan jasa, serta mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi lokal.

Dalam rangka pemerataan pembangunan di seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia maka diperlukan akses yang memadai untuk menghubungkan antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Akses tersebut diwujudkan dengan tersedianya infrastruktur jalan. Pembangunan infrastruktur memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan mobilitas masyarakat, dan memperkuat konektivitas antarwilayah (Santosa et al., 2023). Manfaat dari pembangunan terlebih pada infrastruktur jalan adalah untuk menunjang produktivitas dan pertumbuhan perekonomian masyarakat sehingga berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, pengembangan jaringan jalan tol menjadi salah satu prioritas utama pemerintah sebagai bagian dari upaya meningkatkan daya saing nasional. Salah satu proyek strategis nasional yang tengah menjadi perhatian adalah pembangunan Jalan Tol Yogyakarta - Bawen. Proyek ini diharapkan mampu menghubungkan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Jawa Tengah secara lebih efisien, mempersingkat waktu perjalanan, dan mendorong perkembangan wilayah sepanjang koridor jalan tol (Rachmayani, 2022). Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta – Bawen bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kapasitas pelayanan lalu lintas jaringan jalan. Dengan total panjang 75,82 kilometer, tol ini diharapkan mampu memangkas waktu perjalanan dari Yogyakarta ke Semarang hingga lebih dari 30%, sekaligus meningkatkan efisiensi distribusi barang dan jasa (Mulyanto et al., 2022).

Jalan ini direncanakan terkoneksi dengan jaringan jalan tol antar Provinsi Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah. Diharapkan adanya jalan ini dapat mengurangi beban lalu lintas dan mengurangi kemacetan di ruas jalan nasional serta membantu pengembangan kawasan industri di koridor wilayah Ungaran – Bawen (Kabupaten Semarang). Selain beberapa hal tersebut, dengan adanya jalan ini

diharapkan dapat mendukung kawasan pariwisata Yogyakarta - Solo - Semarang (Joglosemar) yang berimbas pada peningkatan di sektor ekonomi dan logistik.

bagi Masyarakat (Febrianti et al., 2023; Kaufmann, 2009; Musleh et al., 2023).

Good governance adalah konsep tata kelola yang baik dalam pengelolaan sektor publik maupun swasta. Teori ini menempatkan tata kelola yang baik sebagai prasyarat penting untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat secara umum. *Good governance* merupakan konsep yang menekankan pentingnya tata kelola yang transparan, akuntabel, partisipatif, responsif, dan adil dalam pengelolaan sektor publik. Dalam konteks pembangunan infrastruktur, prinsip ini diperlukan untuk memastikan efisiensi dalam penggunaan sumber daya, meminimalkan potensi konflik, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Weston, 1994). Beberapa penelitian menyebutkan bahwa penerapan *good governance* dapat mempercepat pelaksanaan proyek infrastruktur sekaligus meningkatkan keberlanjutan hasil Pembangunan (Dwiyanto, 2005)



Gambar 1. Peta Jalan Tol Yogyakarta – Bawen

Sumber: *kompas.com*

Untuk diketahui, Jalan Tol Yogyakarta-Bawen membentang melintasi dua provinsi, yakni Provinsi Jawa Tengah sepanjang 66,32 Km dan Daerah Istimewa Yogyakarta sepanjang 8,80 Km. Tol Yogyakarta-Bawen terkoneksi dengan Tol Semarang-Solo dan Solo-Yogya-NYIA Kulon Progo.

Proyek pembangunan Jalan Tol Yogyakarta – Bawen terdiri dari 6 Seksi yang melintasi 2 provinsi yaitu D.I. Yogyakarta (Kabupaten Sleman) dan Jawa Tengah (Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung, dan Kabupaten Semarang). Terhitung sampai dengan Februari 2023 pembangunan yang telah berjalan meliputi pekerjaan Paket 1 Seksi 1: Sleman – Banyurejo (STA 67+500 – 76+300) dan Seksi 6: Bawen – Ambarawa (STA 0+000 – 6+300). Panjang jalan utama seksi 1 yang menghubungkan Sleman sampai Banyurejo yaitu sepanjang 8,8 Km serta panjang jalan akses 2,331 Km. Jenis perkerasan yang digunakan pada proyek tol tersebut menggunakan perkerasan lentur (*flexible pavement*) dan perkerasan kaku (*rigid pavement*).

Dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur, penerapan prinsip *good governance* menjadi elemen penting untuk memastikan keberhasilan proyek dan manfaatnya

Mengingat pergeseran masyarakat menuju masyarakat yang lebih teredukasi menuntut pelayanan prima sesuai dengan konsep *good governance*, yang meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan keadilan, bertujuan untuk meminimalkan risiko korupsi, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, serta memastikan keberlanjutan proyek (Diah Kusumawati, 2022; Tamrin et al., 2024). Penerapan prinsip ini juga memungkinkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi proyek.

Good governance, sebagaimana didefinisikan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP, 1997), mencakup transparansi, akuntabilitas, partisipasi, responsivitas, dan efektivitas. Prinsip-prinsip ini penting untuk mencegah terjadinya praktik korupsi, mengelola konflik kepentingan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung proyek Pembangunan (Weston, 1994).

Pada proyek Jalan Tol Yogyakarta-Bawen, prinsip transparansi diperlukan untuk memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat mengenai manfaat, risiko, dan tahapan pembangunan. Akuntabilitas sangat penting untuk memastikan

bahwa seluruh proses berjalan sesuai dengan aturan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, partisipasi masyarakat menjadi aspek kunci dalam membangun kepercayaan publik, terutama dalam konteks pembebasan lahan yang sering menjadi isu utama dalam proyek infrastruktur (Luthfil et al., 2021).

Penerapan *good governance* juga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya dalam proyek pembangunan. Dalam proyek jalan tol, misalnya, pembebasan lahan yang dikelola secara adil dan partisipatif dapat mengurangi potensi konflik, yang pada akhirnya mempercepat proses Pembangunan (Malik, 2024)

Penelitian sebelumnya menunjukkan hubungan erat antara penerapan prinsip *good governance* dengan keberhasilan pembangunan infrastruktur. Menurut (Nurhayati et al., 2020), transparansi dalam proses perencanaan dapat mencegah korupsi, sedangkan partisipasi masyarakat dalam pembebasan lahan dapat mengurangi resistensi terhadap proyek. Dalam proyek-proyek jalan tol di Indonesia, *good governance* juga berperan dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan pemerintah, swasta, dan Masyarakat (Novriany, 2020).

Jalan Tol Yogyakarta - Bawen merupakan salah satu proyek strategis nasional yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antara Yogyakarta dan Jawa Tengah. Proyek ini menghadapi tantangan dalam hal pembebasan lahan dan keterlibatan masyarakat lokal. Menurut laporan (Mulyanto et al., 2022) penerapan prinsip *good governance* menjadi kunci untuk menyelesaikan berbagai kendala yang muncul selama proses pembangunan. Sehingga, dalam praktiknya, penerapan prinsip *good governance* pada proyek infrastruktur sering kali menghadapi berbagai tantangan. Hal ini mencakup kurangnya koordinasi antar instansi, resistensi masyarakat terhadap pembebasan lahan, serta potensi konflik kepentingan yang dapat memengaruhi kelancaran proyek. Dengan demikian, analisis mengenai sejauh mana prinsip *good governance* diterapkan dalam proyek Jalan Tol Yogyakarta-Bawen menjadi penting untuk mengevaluasi keberhasilan proyek ini serta memberikan rekomendasi untuk proyek-proyek serupa di masa depan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip *good governance* dalam perencanaan dan pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen. Fokus penelitian meliputi aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, serta dampaknya terhadap efektivitas dan keberlanjutan proyek. Dengan menggunakan metode studi literatur, penelitian ini juga akan memberikan wawasan teoritis dan praktis yang relevan untuk mendukung pengembangan tata kelola proyek infrastruktur yang lebih baik di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (*literature review*) untuk menganalisis penerapan prinsip *good governance* dalam perencanaan dan pembangunan Jalan Tol Yogyakarta - Bawen. Studi literatur adalah metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis sumber-sumber yang relevan dari jurnal ilmiah, laporan pemerintah, buku, dan dokumen terkait lainnya (Snyder, 2019). Metode ini bertujuan untuk mendapatkan wawasan teoretis dan empiris yang komprehensif terkait topik yang dikaji. Studi literatur memiliki keterbatasan, antara lain ketergantungan pada kualitas dan ketersediaan literatur yang relevan. Oleh karena itu, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut dengan pendekatan empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari:

1. Jurnal Ilmiah: Artikel akademik yang dipublikasikan dalam jurnal bereputasi.
2. Laporan Pemerintah: Laporan resmi dari Kementerian PUPR, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), dan instansi lainnya terkait proyek Jalan Tol Yogyakarta-Bawen.
3. Buku dan Dokumen Teoritis: Literatur yang membahas prinsip *good governance* dan pembangunan infrastruktur.
4. Artikel Media Terpercaya: Informasi tambahan terkait progres dan tantangan dalam pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen.

Menurut *United Nations Development Programme (UNDP, 1997)* *Good governance* didefinisikan sebagai praktik administrasi publik yang efektif, akuntabel, transparan, dan inklusif, di

mana semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, memiliki peran aktif dalam proses pengambilan keputusan (Speth, 1997). Tata kelola ini bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan publik dan sektor swasta dalam pembangunan. Dengan demikian, study literatur pada penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada indikator-indikator utama prinsip good governance, yaitu:

1. **Transparansi:** menjelaskan apakah informasi terkait proyek disampaikan secara terbuka kepada publik.
2. **Akuntabilitas:** menggambarkan bagaimana mekanisme pertanggungjawaban dalam pengelolaan proyek pembangunan jalan tol Yogyakarta – Bawen.
3. **Partisipasi:** digunakan untuk mengukur sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan jalan tol Yogyakarta – Bawen.
4. **Efisiensi dan Efektivitas:** menjelaskan apakah alokasi sumber daya dilakukan secara optimal oleh pemerintah.
5. **Keberlanjutan:** Kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap ekonomi, lingkungan, dan sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Dari hasil analisis literatur, PPP merupakan kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta yang mendanai serta mengoperasikannya melalui kemitraan pemerintah dengan perusahaan swasta, dimana skema ini disebut dengan PPP (Novriany, 2020). Diantara semua sektor yang dibiayai dengan skema PPP paling banyak digunakan di sektor transportasi khususnya dalam pembangunan jembatan, rel kereta api, terowongan, bandara dan jalan tol (Kwak et al., 2009) dalam (Nurhayati et al., 2021). Perencanaan pembangunan Jalan Tol Yogyakarta - Bawen telah dirancang dengan berbagai tahapan yang terstruktur dan didukung oleh jaminan pemerintah untuk memastikan keberlanjutannya. Menurut Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), proyek ini mendapatkan jaminan dukungan pemerintah, termasuk jaminan keuangan

yang dikelola oleh PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII). Tahapan pelaksanaan proyek ini mencakup penandatanganan perjanjian pada November 2020, dimulainya konstruksi pada tahun 2022, dan ditargetkan selesai untuk mulai beroperasi pada tahun 2024. Jaminan dan perencanaan yang matang ini bertujuan untuk meminimalkan risiko, mempercepat penyelesaian, dan memastikan keberhasilan operasional Jalan Tol Yogyakarta - Bawen sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (Mulyanto et al., 2022).

Penerapan prinsip good governance dalam perencanaan dan pembangunan Jalan Tol Yogyakarta - Bawen menunjukkan keberhasilan pada beberapa aspek, meskipun masih terdapat tantangan yang perlu diatasi. Berikut adalah hasil analisis berdasarkan prinsip-prinsip utama good governance:

1. Transparansi

Dikutip dari draf PPP Book 2024, pembangunan Jalan Tol Yogyakarta - Bawen melibatkan komponen biaya yang signifikan dalam skema pembiayaan. Belanja Modal untuk proyek ini diperkirakan mencapai USD 950,36 juta, yang mencakup biaya konstruksi dan pengadaan infrastruktur jalan tol itu sendiri. Namun, informasi terkait dengan belanja operasional proyek ini masih terbatas, mengingat bahwa biaya operasional akan bervariasi sepanjang masa konsesi berdasarkan pengelolaan dan pemeliharaan jalan tol setelah fase konstruksi selesai. Selain itu, proyek ini diperkirakan memiliki periode konsesi selama 40 tahun, yang merupakan durasi standar dalam skema kerjasama pemerintah dan swasta (Public Private Partnership atau PPP) untuk proyek jalan tol di Indonesia. Selama periode konsesi tersebut, pengembalian investasi akan diperoleh melalui biaya pengguna, yaitu tarif yang dikenakan kepada pengendara yang menggunakan jalan tol. Hal ini menunjukkan pentingnya pengelolaan tarif yang tepat dan efisien untuk memastikan kelangsungan pengembalian investasi dan keberlanjutan proyek, sembari tetap memperhatikan daya

beli masyarakat yang akan menggunakan jalan tol tersebut.

Pemerintah dan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) telah menyediakan informasi terkait rencana pembangunan dan manfaat proyek secara terbuka melalui berbagai media, seperti website BPJT, laporan resmi, dan konsultasi publik. Namun, transparansi masih menjadi tantangan mengenai informasi pemodal proyek ini yang masih terbatas, proyek ini mendapatkan jaminan dukungan pemerintah melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), yang berperan penting dalam memberikan jaminan finansial untuk memastikan kelancaran dan keberlanjutan pembangunan.

Adapun jadwal pelaksanaan proyek ini meliputi beberapa tahapan penting:

- 1) Penandatanganan perjanjian antara pihak-pihak terkait dilakukan pada November 2020,
- 2) Konstruksi dijadwalkan berlangsung antara 2022 hingga 2024,
- 3) Sementara operasionalisasi jalan tol ini ditargetkan pada tahun 2024.

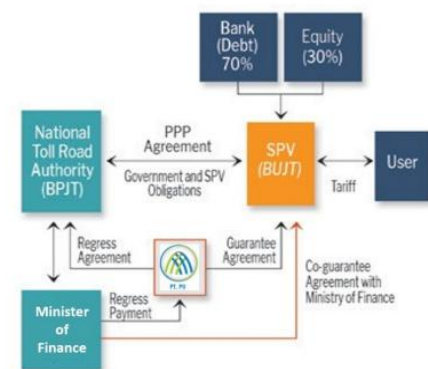
2. Akuntabilitas

Mekanisme pertanggungjawaban telah diterapkan melalui pelaporan berkala kepada publik dan pengawasan oleh Komisi Pengawas Jalan Tol (KPJT). Namun, belum ada laporan independen yang secara menyeluruh mengevaluasi kinerja semua pihak terkait, termasuk efektivitas pengelolaan anggaran. Menurut *Draf PPP Book 2024*, Belanja Modal untuk proyek ini diperkirakan mencapai USD 950,36 juta, yang mencakup biaya konstruksi dan pengadaan infrastruktur jalan tol itu sendiri (Aminudin, 2024). Namun, informasi terkait dengan belanja operasional proyek ini masih terbatas. Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen saat ini berada dalam status sedang dibangun, dengan sejumlah pihak terkait yang memiliki peran strategis dalam kelancaran proyek ini. Proyek ini dikelola oleh Badan Kontraktor Pemerintah

yang dipimpin oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sebagai investor utama, proyek ini melibatkan PT Jasamarga Jogja Bawen, yang merupakan bagian dari konsorsium yang terdiri dari beberapa perusahaan besar, antara lain:

- 1) PT Jasa Marga (Persero) Tbk,
- 2) PT Adhi Karya (Persero) Tbk,
- 3) PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk,
- 4) PT Waskita Karya (Persero) Tbk,
- 5) PT Brantas Abipraya (Persero) Tbk.

Project Structure



Gambar 2. Struktur Proyek Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen

Sumber: PPP Book 2024

3. Partisipasi

Partisipasi masyarakat telah diakomodasi melalui konsultasi publik yang dilakukan sebelum tahap konstruksi. Meskipun demikian, keterlibatan masyarakat masih terbatas pada informasi dasar dan kurang menyentuh pengambilan keputusan strategis, seperti penentuan lokasi jalan tol.

4. Efisiensi dan Efektivitas

Proyek ini telah memenuhi jadwal perencanaan, dengan konstruksi dimulai pada tahun 2022 sesuai target. Namun, kendala seperti penundaan akibat resistensi pembebasan lahan menunjukkan adanya

ruang untuk meningkatkan efisiensi dalam manajemen proyek.

5. Keberlanjutan

Dalam aspek keberlanjutan, pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen telah memperhatikan analisis dampak lingkungan (AMDAL) untuk meminimalkan kerusakan ekologis. Namun, implementasi solusi lingkungan jangka panjang masih memerlukan pengawasan lebih lanjut.

Pembahasan

Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip *good governance* dalam proyek ini telah memberikan landasan penting bagi keberhasilan pembangunan. Namun, beberapa aspek memerlukan perhatian lebih lanjut untuk mencapai implementasi yang ideal:

1. Transparansi

Transparansi informasi merupakan prasyarat penting dalam tata kelola yang baik, sebagaimana ditekankan oleh UNDP (1997). Kurangnya informasi terkait anggaran dan pembebasan lahan dapat memicu konflik sosial dan menghambat progres proyek. Oleh karena itu, peningkatan mekanisme komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat menjadi langkah yang mendesak.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam proyek infrastruktur seperti ini memerlukan pengawasan independen yang lebih ketat untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan dana publik dan seluruh proses berjalan sesuai aturan hukum. Evaluasi ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat (Weston, 1994).

3. Partisipasi

Pelibatan masyarakat yang lebih mendalam, seperti diskusi partisipatif dalam penentuan lokasi dan dampak proyek, dapat meningkatkan legitimasi dan mengurangi resistensi terhadap pembangunan. Hal ini sejalan dengan prinsip partisipasi dalam *good governance*, yang menempatkan masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama dalam proses pembangunan

4. Efisiensi dan Efektivitas

Efisiensi proyek dapat ditingkatkan melalui pengelolaan risiko yang lebih baik, terutama pada isu pembebasan lahan. Pemerintah dapat belajar dari praktik terbaik di proyek jalan tol lain untuk mengurangi penundaan yang disebabkan oleh faktor sosial dan administrasi.

5. Keberlanjutan

Proyek ini telah menunjukkan komitmen terhadap prinsip keberlanjutan melalui analisis dampak lingkungan. Namun, implementasi langkah-langkah mitigasi dampak lingkungan harus terus dipantau untuk memastikan dampak jangka panjang yang minimal terhadap ekosistem lokal.

KESIMPULAN

Penerapan prinsip *good governance* dalam perencanaan dan pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen telah memberikan kontribusi signifikan terhadap keberhasilan proyek, meskipun terdapat sejumlah tantangan yang masih perlu diatasi. Berdasarkan analisis yang dilakukan, prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efisiensi, dan keberlanjutan telah diimplementasikan, tetapi dalam tingkat yang bervariasi.

1. Transparansi telah diterapkan melalui penyediaan informasi terkait proyek kepada publik, meskipun masih terdapat kekurangan dalam komunikasi yang lebih spesifik, terutama dalam anggaran.

2. Akuntabilitas telah diwujudkan melalui pelaporan berkala dan pengawasan oleh lembaga terkait, namun mekanisme pengawasan independen perlu ditingkatkan untuk mencegah penyalahgunaan sumber daya.

3. Partisipasi masyarakat masih terbatas pada tingkat konsultasi dasar, sehingga belum sepenuhnya memenuhi prinsip partisipasi aktif sebagaimana diamanatkan oleh UNDP (1997).

4. Efisiensi dan efektivitas telah dicapai dalam beberapa aspek, terutama jadwal konstruksi yang sesuai rencana, tetapi resistensi sosial

dalam pembebasan lahan masih menghambat optimalisasi.

5. Keberlanjutan telah menjadi perhatian melalui pelaksanaan AMDAL, tetapi implementasi mitigasi dampak lingkungan memerlukan pengawasan yang lebih konsisten.

Secara keseluruhan, penerapan good governance memberikan landasan yang kuat bagi keberhasilan pembangunan infrastruktur strategis seperti Jalan Tol Yogyakarta - Bawen. Namun, peningkatan dalam aspek partisipasi masyarakat, komunikasi yang lebih transparan, dan pengelolaan risiko yang lebih baik diperlukan untuk memastikan tercapainya pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdampak positif bagi masyarakat luas.

REFERENSI

- Aminudin, M. N. (2024). *Public Privat Partnership Infrastructure Projects Plan in Indonesia* (M. N. Aminudin (ed.)). Nusantara Capital City Authority.
- Diah Kusumawati, E. (2022). Strategi Peningkatan Pelayanan Publik Antarmoda Transportasi Dengan Konsep Good Governance Dalam Mendukung Program Tol Laut. In *Majalah Ilmiah Gema Maritim, e-issn* (Vol. 24, Issue 2). www.e-journal.akpelni.ac.id,
- Dwiyanto, A. (2005). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik* (A. Dwiyanto (ed.); 1st ed.). Universitas Gadjah Mada.
- Febrianti, M. K. A. C., Tamrin, M. H., Musleh, M., & Abubakar, A. H. (2023). Innovative Governance in Practice: An Institutional, Actor and Society Approach. *Jurnal Public Policy*, 9(4), 248. <https://doi.org/10.35308/jpp.v9i4.7369>
- Karjono, K., Karmanis, K., & Kusumawati, E. D. (2022). Strategi Peningkatan Pelayanan Publik Antarmoda Transportasi Dengan Konsep Good Governance Dalam Mendukung Program Tol Laut. *Majalah Ilmiah Gema Maritim*, 24(2), 154–165. <https://doi.org/10.37612/gema-maritim.v24i2.319>
- Kaufmann, D. (2009). Governance Matters VIII Aggregate and Individual Governance Indicators. *Development Research Group*, June, 105.
- Luthfil, P., Program Doktor, H., Wasanta, T., & Santosa, W. (2021). Pengaruh Indeks Infrastruktur Jalan Terhadap Indikator Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal HPJI (Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia)*, 7(2), 143–152.
- Malik, I. (2024). Government Effectiveness and Good Governance Index: The Case of Indonesia. *Journal of Governance*, 9(1), 21. <https://doi.org/10.31506/jog.v9i1.23787>
- Mulyanto, D., Adiazma, D., Nurza, F., & Alatas, H. (2022). *Laporan Kajian Tata Kelola BPJT dalam Penyelenggaraan Jalan Tol*. Jakarta Selatan
- Musleh, M., Subianto, A., & Prasita, V. D. (2023). Stakeholder Interaction in the Development of Oxygen Ecotourism on Gili Iyang Island, Indonesia. *Journal of Government Civil Society*, 7(2), 297–323. <https://doi.org/10.31000/jgcs.v7i2.8251>
- Novriany, A. S. (2020). Pola Kerjasama Pemerintah Dengan Pihak Swasta Dalam Pembangunan Infrastruktur. *Jurnal Kertha Negara*, 8(1), 13. https://bphn.go.id/data/documents/aspek_hkm_kontrak_dlm_pembangunan_&_pengoperas
- Nurhayati, E., Tri Wahyuni, E., Akuntansi, M., & Ekonomi dan Bisnis, F. (2020). Tinjauan Topik-Topik Penelitian Dan Kajian Tentang Proyek Jalan Tol Di Indonesia Dengan Skema Kerjasama Pemerintah Dan Badan Usaha (KPBU) The Review Of Research Topics And Research Studies On Toll Road Projects In Indonesia With Public-Private Partnership. *Jurnal Sosek Pekerjaan Umum*, 12(1), 35–44.
- Nurhayati, E., Wahyuni, E. T., & Puspitasari, E. (2021). The Risk of Toll Road Infrastructure with Public-Private Partnership (PPP) Scheme in ASEAN: A Literature Review. In *Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas* (Vol. 5, Issue 1).
- Rachmayani, N. A. (2022). *Informasi Statistik Infrastruktur PUPR 2022* (S. D. Prihapsari, N. A. Adilah, A. Yaman, & M. Utari (eds.)). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. data.pu.go.id

- Santosa, W., Parikesit, D., Dewanti, Y. M. A. W., Makmur, A., Safrilah, S., Ardianta, D., Wimpy, K. E., Danang, S., Yuki, P., Dewanti, M. A. W., Safrilah, A. M., Dwi, S., & Kurniawan, A. (2023). *Perspektif Kebijakan dalam Pembangunan Jalan Tol di Indonesia* (A. Permana, Dewanti, & Suminto (eds.); 1st ed.). pustral@ugm.ac.id.
- Speth, J. G. (1997). Governance For Sustainable Human Development. *Administrator United Nations Development Programme*, 17(2), 52.
- Tamrin, M. H., Lubis, L., & Musleh, M. (2024). *Sustainable governance practices for ecotourism : engaging local communities in the Golden Triangle Island , Indonesia*. 14(2), 377–398.
- Weston, J. C. (1994). *Governance : the World Bank's experience* (C. J. Weston (ed.)). World Bank.